

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN ANJONGAN KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
PRICILA SURYANI
NIM. E42012074

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail :suryanipricila@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini didasarkan pada permasalahan kependudukan mengenai Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah seperti diketahui bahwa Program Keluarga Berencana Nasional merupakan kebijakan pemerintah yang padu untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Di Kecamatan Anjongan program tersebut masih belum berjalan efektif, hal ini dilihat dari tingginya angka kelahiran bayi, tingginya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), masih banyak masyarakat yang belum ber-KB. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan program keluarga berencana di Kecamatan Anjongan belum berjalan efektif yaitu kurangnya sosialisasi dan pelayanan yang dilakukan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), Kesadaran masyarakat akan pentingnya Program Keluarga Berencana dan Rendahnya pola pikir masyarakat mengenai Program Keluarga Berencana yang menjadi tolak ukur masyarakat untuk ber-KB. Saran dari penelitian ini adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) harus lebih aktif lagi memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang Program Keluarga Berencana Nasional agar program ini dapat terlaksana dengan baik.

Kata-kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Publik, dan Kependudukan.

THE EFFECTIVITY OF FAMILY PLANNING PROGRAM IN SUB DISTRICT OF ANJONGAN MEMPAWAH REGENCY

Abstract

The thesis was based on the problems which are population about family planning program in sub district of anjongan mempawah regency as it known the national family planning program is a good government policy to controlling population growth. In sub district of anjonganthe program has not been effective, it is seen from the high birth rate babies, the high number fertile age couples, and many people who have not being using contraception. The thesis was based to find out the effectivity of family planning program in sub district of anjongan mempawah regency. The conclusion of this research is there are factors which lead to family planning program in sub distric of anjongan has not been effective is the lack of socialization and service performed by helper builder village family planning and sub helper builder village family planning, low level of public awarness about family planning programs and low public knowledge about family planning program so it becomes a benchmark for people to using contraception. Advice from the research is the family planning field officer can more active to provide understanding and learning about of national family planning programso the program can be successfully implemented.

Keywords: Effectivity, Public Policy, and Occupation Key

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia merupakan suatu indikator untuk menentukan keberhasilan pembangunan nasional dalam suatu negara, untuk menunjang keberhasilan pembangunan maka perlu di dukung oleh sistem pembangunan yang memadai. Jumlah penduduk merupakan elemen terpenting dalam suatu negara untuk menciptakan negara yang maju dan berkembang. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan kependudukan yang terjadi di Indonesia pada era modernisasi ini adalah melalui Program Keluarga Berencana (KB).

Program Keluarga Berencana dibuat sebagai salah satu Program Pembangunan Nasional Negara Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada saat ini pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN). Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) merupakan badan resmi pemerintah dan departemen yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengendalian

penduduk dan menyelenggarakan Program Keluarga Berencana.

Pelaksanaan program keluarga berencana ini diperkuat dengan adanya undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 47 yang berbunyi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan pokok dari Program Keluarga Berencana Nasional tersebut yaitu Program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, dan program penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada saat ini pemerintah memilih untuk menerapkan Program Keluarga Berencana Nasional, meskipun Program Keluarga Berencana (KB) ini sudah lama diterapkan di Kecamatan Anjongan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu masih banyak masyarakatnya yang belum ber-KB dan menggunakan alat kontrasepsi di

desa-desa. Hal ini dilihat dari jumlah penduduk dan berdasarkan jumlah kepala keluarga yang terdapat di seluruh desa Kecamatan Anjongan, namun masih sedikit masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi (KB).

Pada permasalahan ini yang menyebabkan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan masih belum berjalan efektif yaitu dikarenakan tingginya angka Pasangan Usia Subur (PUS), dan masih banyak masyarakat yang sudah berkeluarga tidak menggunakan alat kontrasepsi (KB), hal ini menyebabkan tingginya angka kelahiran bayi dan tingginya jumlah anak. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan belum berjalan efektif yaitu kurangnya kegiatan sosialisasi dan pelayanan yang dilakukan oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program Keluarga Berencana yang menjadi tolak ukur masyarakat untuk ber-KB.

Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan masih belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat

dari 3.099 Kepala Keluarga hanya 1.620 jiwa masyarakat yang menggunakan alat kontrasepsi (KB) dan 1.837 jiwa masyarakat yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (KB) dimana Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan target utama bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD), Bidan Pemerintah dan Bidan Swasta untuk memberikan penyuluhan, motivasi dan pelayanan di beberapa balai desa atau posyandu untuk terus mengajak masyarakat menggunakan alat kontrasepsi (KB).

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program

Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah?

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah penelitian ini dapat berguna atau digunakan untuk menambah khazanah pengetahuan pemerintahan khususnya tentang : Efektivitas Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah?

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan serta masukan dan kajian lebih dalam kepada Pemerintah Kecamatan Anjongan khususnya para pegawai di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Anjongan yang merupakan bagian dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk mengatur dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan (Nugroho, 2003:54).

Implementasi Kebijakan Publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003:158).

Selanjutnya Implementasi Kebijakan Publik menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Kedua, Sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus

B. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori

1) Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang

didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan harus diperhatikan dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa ada hubungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Ketiga, Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan program. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan yang baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran..

Keempat, Struktur birokrasi yaitu menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi

pelaksanaan sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan (SOP). SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjangnya kompleks, struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara tepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur di desain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

2) Program Keluarga Berencana

Program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum program dapat diartikan dengan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seseorang dikemudian hari. Sedangkan pengertian khusus dari program biasanya jika dikaitkan dengan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau

implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto, 2004:02).

Keluarga Berencana menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya untuk peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengatur kelahiran, jarak usia ideal yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan dan bantuan yang sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Keluarga Berencana adalah suatu upaya manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum dan moral pancasila untuk kesejahteraan. Dengan kata lain program keluarga berencana ini dibuat untuk diterapkan di dalam lingkungan masyarakat untuk memajukan kualitas sumber daya manusia dengan membatasi jumlah penduduk yang akan menjadi pemicu permasalahan kependudukan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah Indonesia (Entjang Ritonga, 2003:87).

Program Keluarga Berencana adalah sebuah program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan dalam mengendalikan kelahiran agar tidak terjadi lonjakan penduduk. Adapun tujuan program keluarga berencana dibagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, adalah tujuan umum untuk mewujudkan visi dan misi program KB yaitu membangun kembali dan melestarikan pondasi yang kokoh bagi pelaksana program KB di masa mendatang untuk mencapai keluarga yang berkualitas. *Kedua*, adalah tujuan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera melalui

pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Menciptakan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Handayani, 2010:29)

Sasaran Program Keluarga Berencana dibagi menjadi dua yaitu sasaran secara langsung dan sasaran tidak langsung. *Sasaran secara langsung* adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. *Sasaran tidak langsung* adalah pelaksana dan pengelola KB, dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, dan keluarga yang sejahtera (Handayani, 2010:29).

3) Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat membawa hasil atau berhasil guna. Sedangkan organisasi merupakan kesatuan (susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) untuk tujuan tertentu atau bisa disebut juga kelompok kerja sama

antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas diperlukan dalam berbagai aktivitas atau kegiatan, termasuk dalam kegiatan berorganisasi.

Efektivitas merupakan (hasil guna) dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa jauh organisasi dapat dinyatakan berhasil) dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi efektivitas (hasil guna) dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi (sampai seberapa jauh organisasi dapat dinyatakan berhasil) dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan (Johny Setyawan, 2013:253).

Pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan suatu implementasi kebijakan yaitu:

Pertama, adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya

adalah how excellent is the policy. Sisi kedua dari kebijakan adalah, apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah - masyarakat atau swasta, serta implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama dengan masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarah kegiatan masyarakat, seperti bagaimana

perusahaan harus dikelola, atau dimana pemerintah tidak efektif menyelenggarakannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri berkala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

Ketiga, adalah tepat target. Ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dan kondisi mendukung atau menolak. Ketiga, apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektif dengan kebijakan sebelumnya.

Keempat, adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu

lingkungan kebijakan yang merupakan interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut oleh Calista sebagai variabel eksogen yang terdiri dari *public opinion* yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals* yakni individu-individu

tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada teori, pendapat dan penjelasan-penjelasan di atas menjelaskan bahwa suatu program terbentuk dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani permasalahan yang terjadi di dalam suatu negara. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kependudukan seperti mengatur tingkat kenaikan jumlah penduduk, mengatur angka kelahiran anak, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan tentang Efektivitas Program Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah. Karena dalam penelitiannya peneliti menggambarkan semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan dalam

bentuk narasi menyangkut keadaan pada saat penelitian.

Subjek penelitian yaitu di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana atau (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang objeknya terdiri dari 2 (Dua) orang Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Anjongan, 1 (satu) orang Bidan Puskesmas Anjongan Melancar, 1 (satu) orang masyarakat Kelurahan Anjongan Melancar, 1 (satu) orang masyarakat Desa Anjongan Dalam, 1 (satu) orang masyarakat Masyarakat Desa Kepayang, 1 (satu) orang masyarakat Desa Pakbulu, dan 1 (satu) orang masyarakat Desa Dema.

Instrumen pengumpulan data Pedoman wawancara merupakan instrumen pada saat melakukan wawancara kepada informan. Dalam hal ini, pedoman wawancara disusun sesuai dengan pokok permasalahan penelitian dan berlandaskan pada pertanyaan penelitian. Kemudian dibantu oleh alat dokumentasi yang terdiri dari kamera, buku dan alat tulis.

Dalam pembuatan penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber mengingat penulis telah memperoleh data dari berbagai sumber data ditempat yang

diteliti. Peneliti menggunakan berbagai sumber data penelitian dari hasil wawancara dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Bidan Puskesmas Anjongan dan Masyarakat. Namun penulis menggabungkannya dengan menggunakan triangulasi teknik mengingat peneliti banyak menggunakan data-data sebagai pedoman penulisan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan faktor-faktor yang menyebabkan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan belum berjalan efektif. Ada empat (4) tepat hal hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji hal-hal yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa suatu kebijakan yang diambil tersebut dianggap tepat untuk mengatasi suatu masalah, maka kebijakan tersebut akan mendapatkan respon yang baik dari pihak

pelaksana maupun pihak pengguna kebijakan serta memberikan dampak yang baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Menurut informasi yang peneliti peroleh dari kasi penyuluhan keluarga berencana mengatakan bahwa program keluarga berencana sudah dianggap sebagai program yang tepat untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk di kecamatan Anjongan, dan hasil dari penerapan program keluarga berencana ini ada desa yang dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini sudah tepat hanya saja terdapat beberapa kendala-kendala yang timbul pada saat pelaksanaan yang disebabkan oleh masyarakat yaitu pola pikir masyarakat yang mengatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi (KB) seperti MKJP ini masih haram dan tidak sesuai dengan aturan agama khususnya masyarakat yang beragama islam.

2. Tepat Pelaksanaan

Dalam hal ini proses pelaksanaan harus dilakukan secara tepat agar proses pelaksanaan lebih terarah. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana ini tidak hanya pihak pemerintah yaitu Petugas Lapangan

Keluarga Berencana (PLKB) sebagai penggerak yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengorganisasian sehingga program ini dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari kasi penyuluhan keluarga berencana dapat diketahui bahwa Pelaksanaan program ini sudah dilaksanakan pada tahun 2009 dan program ini dikatakan sudah tepat namun program keluarga berencana ini baru mulai berjalan secara efektif pada tahun 2012, permasalahan yang dihadapi adalah karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya program keluarga berencana sehingga pelaksanaan program ini belum berjalan dengan baik.

3. Tepat Target

Dalam Dalam suatu program perlu adanya target yang digunakan untuk pengukuran suatu

Menurut hasil penelitian yang peneliti peroleh dari Kasi Penyuluhan Keluarga Berencana kecamatan Anjongan adalah target yang digunakan oleh petugas pelaksana program keluarga berencana adalah 100% dengan target minimal yaitu 70%. Dengan target tersebut dapat kita ukur

seberapa berhasil capaian program keluarga berencana yang dilaksanakan petugas pelaksanaan program keluarga berencana.

Adapun target atau sasaran program keluarga berencana ini adalah ibu-ibu yang masih dalam usia produktif dengan pemberian pemahaman-pemahaman dan pengertian-pengertian terhadap program keluarga berencana. Di Kecamatan Anjongan jumlah pengguna KB masih belum mencapai target yang telah ditentukan secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan masih belum efektif untuk meningkatkan persentase pencapaian hasil program sehingga perlu adanya peningkatan dan penambahan kegiatan untuk mengefektifkan pelaksanaan program keluarga berencana untuk di kecamatan Anjongan.

4. Tepat Lingkungan

Dalam hal ini lingkungan yang akan dituju untuk menerapkan program ini adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdapat kelompok-kelompok penekan dan kelompok-kelompok kepentingan yang menginterpretasikan kebijakan, implementasi kebijakan dan

individuals yakni individu-individu tertentu yang menjadi sasaran program ini.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab I latar belakang dan bab V tentang hasil penelitian dan pembahasan, terdapat kendala yang menjadi penyebab Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan belum berjalan efektif yaitu petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (Sub PPKBD) kurang aktif menjalankan tugasnya di lingkungan masyarakat. Selain dari petugas yang kurang aktif membeikan penyuluhan dan pelayanan, masyarakat yang panatik juga menjadi penyebab dan tolak ukur untuk menggunakan alat kontrasepsi (KB), tingginya angka kelahiran bayi dan tingginya jumlah anak. Dari data yang diberikan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa dari 4.848 Kepala Keluarga hanya 52,27% saja masyarakat yang ber-KB. Tentunya angka itu menunjukkan bahwa Program Keluarga Berencana di Kecamatan

Anjongan masih belum berjalan efektif. Adapun simpulan yang dapat peneliti simpulkan dalam permasalahan ini adalah:

1. Tepat Kebijakan

Kebijakan mengenai Program Keluarga Berencana (KB) merupakan kebijakan yang dibuat dan bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Bab V (Lima), dapat kita ketahui bahwa kebijakan tentang program keluarga berencana ini sudah dianggap tepat untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk di kecamatan Anjongan, dan hasil dari penerapan program keluarga berencana ini ada desa yang dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini sudah tepat.

2. Tepat Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan harus dilakukan secara tepat agar proses pelaksanaan lebih terarah. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana ini tidak hanya pihak pemerintah yaitu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai penggerak yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan,

pengembangan dan pengorganisasian. Dalam pelaksanaan diperlukannya upaya-upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal selain itu diperlukannya konsistensi dari petugas yang melaksanakannya sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan suatu program, perlu adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pelaksana agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga tujuannya dapat tercapai.

3. Tepat Target

Dalam suatu program perlu adanya target yang digunakan untuk pengukuran suatu ketercapaian atau keberhasilan program. Dengan target tersebut kita dapat mengetahui seberapa berhasil program yang kita laksanakan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan yang terdapat di Bab V (lima) menjelaskan bahwa target yang digunakan oleh petugas pelaksana program keluarga berencana adalah 100% dengan target minimal yaitu 70%. Target atau sasaran program keluarga berencana ini adalah ibu-ibu yang masih dalam usia produktif

dengan pemberian pemahaman-pemahaman dan pengertian-pengertian terhadap program keluarga berencana.

4. Tepat Lingkungan

Dalam indikator ini lingkungan yang akan dituju untuk menerapkan program ini adalah lingkungan eksternal kebijakan yang terdapat kelompok-kelompok penekan dan kelompok-kelompok kepentingan yang menginterpretasikan kebijakan, implementasi kebijakan dan individuals yakni individu-individu tertentu yang menjadi sasaran program ini. Di Kecamatan Anjongan sudah tepat untuk dilaksanakan program keluarga berencana, dan tidak ada penolakan ataupun protes yang dilakukan oleh masyarakat selama program ini berjalan di kecamatan Anjongan.

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Kecamatan Anjongan khususnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kecamatan

Anjongan sebagai selaku instansi yang diteliti, Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Tepat Kebijakan

Perlu adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada peserta keluarga berencana untuk mengikuti program keluarga berencana ini sehingga anggapan-anggapan tentang pemasangan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang kurang sesuai dengan syariat agama dapat hilang dari persepsi masyarakat.

2. Tepat Pelaksanaan

Masyarakat masih menganggap bahwa program keluarga berencana ini tidak terlalu penting sehingga harus adanya arahan dari pihak kecamatan Anjongan berupa pengeluaran Surat Edaran tentang pentingnya program keluarga berencana ini sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa program ini sangat penting. Pihak Puskesmas harus menambah ketersediaan alat kontrasepsi agar tidak terjadi kekosongan.

3. Tepat Target

Kegiatan penyuluhan masih kurang efektif jika hanya dilaksanakan satu kali dalam satu bulan dan perlu adanya penambahan paling sedikit dua kali dalam sebulan agar kegiatan tersebut berjalan dengan hasil yang efektif. Selain itu, perlunya kesadaran dari petugas penyuluhan untuk lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan sehingga program ini dapat berjalan dengan efektif.

4. Tepat Lingkungan

Program keluarga berencana ini sudah tepat dilaksanakan untuk di wilayah Kecamatan Anjongan hanya saja perlu adanya perhatian yang khusus untuk desa yang masyarakatnya masih kurang peduli dengan adanya program keluarga berencana ini.

Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana tersebut peran dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), yang dibantu oleh Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (Sub PPKBD), Bidan Pemerintah serta Bidan Swasta Tidak hanya mengajak warga berpartisipasi

dalam kegiatan Posyandu saja tetapi mereka harus mampu membina dan mengarahkan masyarakat serta mampu mengubah pola pikir masyarakat yang masih pendek dan panatik agar mau menggunakan alat kontrasepsi (KB). Agar Program Keluarga Berencana (KB) berjalan efektif maka upaya yang harus dilaksanakan adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) harus sering terjun ke desa-desa untuk memantau dan memberikan rancangan rencana-rencana kegiatan yang signifikan kepada Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) untuk sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial di seluruh posyandu atau polindes seluruh desa dan mengajak masyarakat agar mau ber-KB.

F. REFERENSI

Literatur Buku-buku :

AG, Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2004. *Dasar-dasar Supervisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Akhmad Subkhi, dan Mohammad Jauhar. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnely Jr. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (Terjemahan) Edisi Delapan*. Jakarta: Binarupa Aksara.

Handayani, Sri. 2010. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.

Hartanto, Hanafi. 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Sinar Harapan.

Indhihaho, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Maunte, Sauth. 2005. *Program KB Terpadu*. Pusat Pelatihan Pegawai dan Tenaga Program

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Ritonga, Abdurrahman, 2003. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Citra Aditya.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2012.

_____. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.

<http://doktersehat.com/pengertian-dan-tujuan-keluarga-berencana-kb/>
<http://alatkontrasepsi.org/>

Peraturan perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana.

RAKERDA Kabupaten Mempawah tentang Program Keluarga Berencana tahun 2015 – 2019

Skripsi :

Olivia Atika (2014) Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Singkawang Utara.

Merryence Ahmad Haidir (2013) Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Senggigi.

Rujukan Elektronik :

<http://kalbar.bkkbn.go.id/layouts/mobile/mbllists.aspx>



UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Pricila Suryani
NIM / Periode Lulus : E42012074 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : suryanipricila@gmail.com / 085787336641

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BENCANA DI KECAMATAN ANJONGAN
KABUPATEN MEMPAWAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

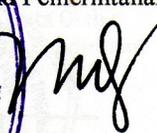
- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui
Pencipta/Pengelola Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Januari 2017


(Pricila Suryani)

